

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 .
- Amal, Ridha Haykal. Hukum Perlindungan Konsumen, Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Atsar, Abdul Rani Apriani, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita. Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Bojonegoro: Madza Media, 2023.
- Kristiyanti, Celine Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Maryanto, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) , Semarang: Unissula press, 2019.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit Sapto., Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*, Palur Wetan: Oase Pustaka, 2020.
- Panjaitan, Hurman, Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Usaha, Jakarta : Jala Permata Aksara 2021.
- Rustendi, Tedi. Mengenal dan Memanfaatkan Internet, Bandung : Pt. Sarana Pancakarya Nusa, 2018.
- Safudin, Endrik. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitase, Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Saleh, Sirajuddin. Analisis Data Kualitatif, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sari, Ibrahim M. B. Metode Penelitian Berbagai Bidang Keilmuan (Panduan & Referensi), Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Jawa Barat: Qiara Media, 2019.
- Wajdi Farid, Lubis, Umami Salamah, Diana Susanti, Hukum Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Lengkapi Arbitase *Online* dan Arbitase Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2023.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra. dkk, Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal Teori Dan Praktik, Aceh : Syiah Kuala Universty Press, 2021.

Jurnal

- Alfina, Ulfa Isni Kurnia, Fahlul Rizki, and Rendy Yudha Pratama. "Konsultasi Pendidikan Terkait Perbedaan Pendidikan Teknologi Informasi Dan Teknik Informatika." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu(ABDI KE UNGU)* 4, no. 2 (2022): 64–68.
- Amrina, Febri Ismatu, and Wiwin Priana Primandhana. "Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Forum Ekonomi* 24, no. 2 (2022): 483-

487.

- Aprita, Serlika. "Peranan Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 1 (2021): 37–61.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" : *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 13-23.
- Batubara, Gialdah Tapiansari dan Takdir Yakindo. "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Pinjaman Online Terhadap Ancaman Debt Collector Dan Penjualan Data Konsumen." *Jurnal Pro Hukum* 11, no. 3 (2022): 464–477.
- Carundeng, Refaldy Braif, Anna S. Wahongan, Presly Prayogo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diredas Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik," *Lex Privatum* 10, no. 1 (2022): 188-198.
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, and Made Gde Subha Karma Resen. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending." *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): 479-491.
- Fais Kalsum "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 309-328.
- Gerardus, Gegen, and Aris Prio Agus Santoso. Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14, no.2 2022: 28-42.
- Hartanto, Ratna and Ramli Purnama, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, no. 2 (2018): 320-338,
- Khoirunisa, Dhea, Desy Nia Arifiani, Maulana Rizqi Muhammad Maulana, and Kartini Panggiarti Endang. "Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Mengawasi Pelayanan Pada Perusahaan Financial Technology (Fintech) Di Indonesia." *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2023): 127-132.
- Korompis Merry, "Pengaruh Pemahaman , Kemudahan Penggunaan Dan Motif Peer To Peer Lending Pada Mahasiswa Program Studi," *Jurnal Innovative* 20, No. 2 (2023): 179-189.
- Kristian, O Y. "Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Fintech P2P Lending Dari Tindak Pidana Ekonomi Dan Terhadap Penyedia Layanan Fintech P2P Lending Ilegal " *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 297-230.
- Kurniawati Putri, "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Recital Rivview* 02, no. 2 (2020): 93-111.
- Lestari, Maudy Andreana, Dewi Ari Shia Wase Meliala, Puja Anudiwanti, and Nasya Nurul Amalina. "Optimalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Proteksi Hak Konsumen Di Ranah Siber." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 4 (2021): 309–328.
- Novita, Windy Sonya, and Moch. Najib Imanullah. "Aspek Hukum Peer To Peer

- Lending (Identifikasi Permasalahan Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian).” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 151-157.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Pambudi, Rakhmat Dwi. “Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa Uin Walisongo” 4, no. 2 (2019): 74–81.
- Pertiwi, Halla Fitri. “Pengaruh Perkembangan Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia” 7 (2023): 6064–6071.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok, and Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional” 2, no. 2 (2023): 188–200.
- Purwanto, Hadi, Delfi Yandri, and Maulana Prawira Yoga. “Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat.” *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 80-91.
- Putra, Rengga Kusuma dkk, ”Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6, (2024): 2200-2206.
- Putri, Reski Eka dan Amiruddin Muhammad, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Hadapan Hukum,” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 413-420.
- Rahmatullah Aulia, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pinjaman Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2024):1-20.
- Rimanda, Rahmi. “Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 18–34.
- Rizki, Maurid, and Devi Siti Hamzah Marpaung. “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang.” *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 163–177.
- Saleh Khadir, Halida Zia, “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia ,” *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 79-91.
- Santoso, Budi and Edwin Zusrony. “Analisis Persepsi Pengguna Aplikasi Payment Berbasis Fintech Menggun Technology Acceptance Model (TAM)” 11, no. 1 (2020): 49-54.
- Sinaulan, JH. “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79-84.
- Simatupang, Shera Aulia “Implementasi Prinsip Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Di BPSK,” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 9, no. 1 (2017): 42-57.
- Sitepu, Rida Ista, and Hana Muhamad. “Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 7–14.

- Sitompul, Meline Gerarita. "Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia." *Jurnal Yuridis Unaja* 1, no. 2 (1970): 68–79.
- Sualang, Patrik Alfredo dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Peminjaman Dengan Sistem Peer To Peer Lending," *Lex Administratum* XIII, no. 1 (2023): 1-10.
- Sudiarti, Elin and Nuraliah Ali. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online." *Palangka Law Review* 03, no. 01 (2023): 14–31.
- Sudirman, Lu, and Hari Sutra Disemadi. "Titik Lemah Industri Keuangan Fintech Di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 3 (2022): 471–93.
- Sundari, Rina. "Dimensi E-Commerce Dalam Membentuk Customer Satisfaction Milenial Lazada." *Bisnis Kompetif* 1, no. 2 (2022): 87-93.
- Suryadi, Mohammad Anton dan Efendi Rizal M., "Tinjauan Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Pojk) Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Financial Technology (Fintech)," *Justness : Jurnal Hukum Politik Dan Agama* 2, no. 1 (2022): 1-15.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–2478.
- Wahyuningsih, Sri. "Implementasi Peer to Peer Lending Di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 8, no. 1 (2019): 1-26.
- Wulandani Suardja, and Odjo Tatang, "Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan Dengan KUHPERDATA Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Journal Yustitia* 06, no. 2 (2020): 201-216.
- Wulandari, Septi Tri and Khoirun Nasik. "Menelisik Perbedaan Mekanisme Sistem Peer To Peer Lending Pada Fintech Konvensional Dan Fintech Syariah Di Indonesia" 1, no. 2 (2021): 66–90.
- Yusuf, Yolanda. "Kualifikasi Tindak Pidana Atas Kesalahan Pe,bacaan Resep Dokter Oleh Apoteker Yang Menimbulkan Kerugian Pada Pasien Yolanda." *Simpodium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 83-89.

Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tahun 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pedanaan Bersama Berbasis teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Konsumen

E-Books

Dananjaya, Nyoman Satyayudha Dananjaya. Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan, Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION), Denpasar, 2017, diakses pada 3 Maret 2023, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/f3a5453d682ed652293ea714d7cbebb3.pdf

Internet

AdaKami, “Tentang AdaKami” Adakami, diakses pada Kamis 27 Mei 2023, [Tentang Kami | AdaKami](#)

Fitrat, Irfan “Ratusan Aduan Konsumen Ke BPSK Jabar Kebanyakan Soal Pinjol”, di akses pada 14 Februari 2024 <https://rejabar.republika.co.id/berita/rp4geg432/ratusan-aduan-konsumen-ke-bpsk%20jabar-kebanyakan-soal-pi>

Gozal Ridwan Prima, Hindari Penipuan, “Perusahaan peer to peer Lending Dorong Masyarakat Waspada”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-9-Oktober-2023.aspx>

Iradat Damar, ”Survei APJII: Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 orang”, CNN Indonesia, diakses pada 18 Maret 2024, <https://keuangan.kontan.co.id/news/hindari-penipuan-perusahaan-peer-to-peer-lending-dorong-masyarakat-waspada>

Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK Per 9 Oktober 2023”, diakses pada 18 Maret 2023. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: OJK Perkuat Operasional Fintech Peer to Peer Lending”, diakses pada 20 Juli 2024 ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending.

Suandharu Haru, “Pengguna Pinjol Tertinggi, Haru: Perubahan Ekonomi Harus Dilakukan”, diakses pada Kamis 20 Mei 2024. <https://jabar.pks.id/2023/12/18/pengguna-pinjol-tertinggi-haru-perubahan-ekonomi-harus-dilakukan/>
[Surat Perjanjian \(adakami.id\)](#)

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Wawan Gunawan, S.H., M.H, Jum'at 7 Juni 2024
Pukul 10.00 WIB Melalui *Google Meet*

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA